

## Demonstrasi dalam Pandangan Ulama Nusantara: Hubungan Islam dan Negara dari Era Pasca Kemerdekaan Hingga Era Digital

Muhammad Yasser

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Daarul Fatah Tangerang

Email: [penerbityes@gmail.com](mailto:penerbityes@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study analyzes the problem of demonstrations in Indonesia from the perspective of three Islamic scholars from across generations: KH. Hasyim As'ari, KH. Abdurrahman Wahid, and KH. Ahmad Bahauddin Nursalim. This issue is important to address, considering that demonstrations are a form of active and critical public participation in a democratic country, but on the other hand, they are also vulnerable to being exploited by various interests that lead to the act of treason. This is where the crucial role of religious leaders, especially muslim clerics, lies in maintaining the relationship between Islam, as the country's majority religion, and the state. For this purpose, a qualitative-descriptive research method is used on various literature documents, both primary and secondary, in order to gain a deep and rich understanding. This study concludes that demonstrations are important in a democratic country, but they must still be carried out based on Islamic values to avoid being trapped in anarchic actions and treason.*

**Keywords:** *Demonstration, Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, Ahmad Bahauddin Nursalim.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis persoalan demonstrasi di Indonesia dalam pandangan tiga ulama lintas generasi, yaitu, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdurrahman Wahid dan KH. Ahmad Bahauddin Nursalim. Persoalan ini penting untuk diangkat mengingat demonstrasi merupakan bentuk partisipasi aktif-kritis masyarakat di suatu negara demokrasi, namun di sisi lain ia juga rentan untuk ditunggangi berbagai kepentingan yang mengarah kepada makar. Disinilah letak pentingnya peran para tokoh agama, khususnya ulama, dalam menjaga relasi antara Islam, sebagai agama mayoritas, dengan negara. Untuk keperluan ini maka digunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif terhadap berbagai dokumen kepustakaan, baik yang sifatnya primer ataupun sekunder, dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam dan sekaligus kaya. Penelitian ini sampai pada kesimpulan pentingnya demonstrasi dalam suatu negara demokrasi, namun tetap harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai keislaman sehingga tidak terjebak dalam aksi anarkis dan makar.*

**Kata Kunci:** *Demonstrasi, Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, Ahmad Bahauddin Nursalim*

## A. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan disusunnya tulisan ini, Indonesia sedang dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran. Diawali dari demonstrasi di depan kantor bupati wilayah Pati sebagai akibat dari kebijakan dan pernyataan Bupati yang dianggap merugikan rakyat dan sikapnya yang arogan, hingga puncaknya aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR yang dipicu aksi “joget-joget” beberapa wakil rakyat saat sidang kenaikan tunjangan anggota DPR, menyusul dengan serangkaian gelombang demonstrasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia yang melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ironisnya lagi berbagai aksi gelombang demonstrasi tersebut terjadi bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke 80 sepanjang Agustus hingga awal September 2025 (UMJ, 2025). Negara yang semestinya melindungi kepentingan rakyat banyak justru menjadi tak ubahnya “penjajahan” model baru yang menekan rakyat dengan berbagai kebijakannya yang memberatkan dan hanya menguntungkan sekelompok orang dari kalangan penyelenggara pemerintahan dan oligarki.

Namun niatan mulia dari aksi demonstrasi yang dilakukan, justru tercoreng dengan berbagai aksi anarkis yang dilakukan sekompok orang dengan mengatasnamakan rakyat. Mulai dari aksi pengrusakan berbagai sarana umum hingga penjarahan yang dilakukan terhadap rumah beberapa anggota DPR hingga Menteri Keuangan. Ironisnya, dari pelacakan yang penulis lakukan terhadap berbagai media sosial online, ternyata tidak sedikit yang mendukung dan bersimpati terhadap berbagai aksi anarkis dimaksud. Pada titik ini peran para pemuka lintas agama, khususnya Islam, menjadi sangat penting dalam menjaga marwah demokrasi di Indonesia (Kompas, 2025).

Salah-satu tema utama dalam memahami dinamika sosial dan politik di Indonesia adalah perihal bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama dengan negara. Islam, sebagai agama mayoritas, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik dan norma sosial. Dalam konteks ini, ulama sering kali berperan sebagai jembatan yang menghubungkan idealisme ajaran Islam dan praktik pemerintahan. Menurut M. Quraish Shihab, pengaruh Islam dalam pemerintahan Indonesia tidak hanya terlihat dari aspek hukum, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika yang diusung oleh para pemimpin negara (Shihab, 2020).

Demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia, terutama setelah kemerdekaan. Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, demonstrasi sering kali dilakukan untuk menyuarakan aspirasi umat, baik dalam isu sosial, politik, maupun ekonomi. Contohnya, demonstrasi yang dipimpin oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1967 menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi bukan hanya sekadar tindakan protes, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial (Hasyim, 2019).

Artikel ini memfokuskan penelitiannya terhadap pandangan tiga ulama terkemuka di kalangan umat muslim Indonesia, khususnya warga nahdliyin (NU): KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha). Pemilihan terhadap ketiga sosok ini bukannya tanpa alasan, melainkan karena dianggap mewakili semangat zamannya (*zeitgeist*) masing-masing, dimana mereka memiliki

pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami hubungan antara Islam dan negara, termasuk dalam persoalan demonstrasi. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemikiran Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi (Zuhri, 2021).

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, cenderung menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan negara. Ia berpendapat bahwa demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebaliknya, Gus Dur memiliki pandangan yang lebih liberal, menganggap demonstrasi sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, Gus Baha juga memberikan perspektif yang unik, mengaitkan demonstrasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam (Naim, 2022).

Perbedaan konteks dan pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh latar-belakang sejarah dan sosial masing-masing ulama. KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947) hidup di era ketika Indonesia baru merdeka dan memerlukan stabilitas. Gus Dur (1940-2009), sebagai presiden terpilih langsung pertama, menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme yang lebih kompleks di era transisi dari Orde Baru memasuki era Reformasi. Sementara itu Gus Baha (1970-kini), yang lebih muda, berusaha menjembatani antara tradisi (*turats*) dan modernitas (*hadatsah*) dalam konteks yang lebih kontemporer di era digital dewasa ini (Sukardi, 2023). Perbedaan ini akan dianalisis lebih mendalam dalam penelitian ini.

Demikianlah, penelitian ini berpretensi untuk menganalisis pandangan ulama Nusantara terkait demonstrasi dalam konteks hubungan Islam dan negara. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana ulama melihat peran demonstrasi dalam memperjuangkan aspirasi umat. Hal ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks politik yang dinamis (Rahman, 2022). Penelitian ini juga bertujuan untuk merekonstruksi hubungan antara Islam dan negara dari era pasca kemerdekaan (Hasyim Asy'ari), reformasi (Gus Dur) hingga era digital (Gus Baha). Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, cara umat Islam berinteraksi dengan negara juga mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ulama merespons perubahan ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antara agama dan negara (Hidayat, 2023).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggali pandangan para ulama mengenai urgensi dan batasan dalam melakukan demonstrasi di Indonesia sebagai negara Islam demokratis terbesar di dunia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, politik dan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya pandangan tersebut. Hal ini dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen kepustakaan yang tersedia, baik primer ataupun sekunder, termasuk wawancara dengan para ahli dan tokoh agama yang kompeten, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya sekaligus mendalam (Sugiyono, 2020). Artikel ini membatasi penelitiannya pada pandangan tiga ulama, yaitu, KH. Hasyim Asy'ari, KH.

Abdurrahman Wahid dan KH. Ahmad Bahauddin Nursaha. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur yang relevan, wawancara dengan para ahli dan tokoh agama, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan demonstrasi dan hubungan Islam dengan negara. Dengan menggabungkan berbagai sumber ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tema yang diangkat (Fauzi, 2021).

### **C. HASIL DAN DISKUSI**

Hubungan antara Islam dan negara telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan di kalangan pemikir dan ulama. Secara umum, terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan ini. Pertama, teori teokrasi yang berpendapat bahwa negara harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki legitimasi religius. Dalam konteks ini, pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah fil ardhi*), yang bertugas menegakkan hukum-hukum Islam. Teori ini banyak dianut oleh kelompok yang menginginkan penerapan syariah secara total dalam pemerintahan (Esposito, 2011).

Kedua, teori sekularisme yang menganggap bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Dalam pandangan ini, negara tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan agama, dan sebaliknya. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi agama dalam kehidupan publik, terutama di negara-negara yang pernah mengalami kolonisasi (Norris & Inglehart, 2004). Di Indonesia, meskipun secara formal negara mengakui keberadaan agama, praktiknya menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum Islam dan hukum negara.

Ketiga, teori integrasi yang mencoba menjembatani antara sekularisme dan teokrasi. Dalam teori ini, negara diharapkan dapat menghormati nilai-nilai agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang pluralistik, di mana berbagai agama hidup berdampingan (Mujiburrahman, 2006).

Pemikiran Islam di Nusantara mengalami perkembangan yang signifikan sejak kedatangan Islam pada abad ke-13. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia adalah Hamka, yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Dalam bukunya, "Tasawuf Modern", Hamka menyatakan bahwa Islam harus dapat menjawab tantangan zaman dan dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat Indonesia (Hamka, 1980).

Di era modern, pemikiran Islam di Indonesia semakin beragam. Banyak ulama dan cendekiawan yang menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran baru terhadap teks-teks agama untuk menjawab tantangan zaman, seperti yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid. Ia mengusulkan bahwa Islam harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat (Madjid, 1997).

Salah satu contoh nyata dari perkembangan pemikiran ini adalah munculnya organisasi-organisasi Islam yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini berperan penting dalam menciptakan dialog antara nilai-nilai Islam dan tantangan modernitas, serta dalam

mempromosikan partisipasi aktif umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (NU, 2023).

### **Sejarah Demonstrasi di Indonesia**

Demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik telah ada di Indonesia sejak masa penjajahan. Pada awal abad ke-20, berbagai gerakan sosial mulai muncul, seperti Sarekat Islam yang mengorganisir demonstrasi untuk menuntut hak-hak politik dan ekonomi (Suharto, 2010). Demonstrasi ini sering kali dihadapkan pada represifitas pemerintah kolonial, yang menyebabkan banyak tokoh pergerakan ditangkap atau diasingkan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, demonstrasi menjadi salah satu cara bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Pada tahun 1966, demonstrasi besar-besaran terjadi untuk menuntut pengunduran diri Presiden Sukarno dan pelaksanaan reformasi. Gerakan ini dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S, yang berujung pada jatuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (Liddle, 1996).

Di era reformasi 1998, demonstrasi dalam skala masif kembali meledak sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan korupsi yang melanda pemerintahan Soeharto. Demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hasilnya, Soeharto terpaksa mengundurkan diri, dan Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka (Mietzner, 2009). Pada momen bersejarah ini banyak ulama, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah, yang ikut serta bahkan menjadi pemimpin terdepan dalam gerakan reformasi. Mereka mengeluarkan fatwa yang mendukung hak rakyat untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan demokrasi (Abdurrahman, 1999). Fatwa-fatwa ini memberikan legitimasi moral bagi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil.

Akhirnya di era digital ini, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di seluruh wilayah Indonesia sebagai buah dari kekecewaan masyarakat terhadap sikap para pejabat negara yang dianggap tidak simpatis dengan krisis ekonomi yang sedang melanda masyarakat, sehingga melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat. Menurut Mahfud MD demonstrasi dalam skala besar terjadi karena akumulasi dari krisis ekonomi yang berpadu dengan krisis politik, tepatnya hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa karena dinilai hanya menguntungkan oligarki tertentu. Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, demonstrasi besar kali ini sangat kental dengan peran media sosial sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang sangat melimpah sekaligus juga bersifat mentah sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam meresponnya. Mahfud sendiri menilai demonstrasi ini bersifat organik (lahir dari kekecewaan masyarakat luas), namun kemudian rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu sehingga diperlukan penanganan yang tepat (Tempo, 2025).

Ulama di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai gerakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Mereka sering kali menjadi jembatan

antara masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks demonstrasi, ulama sering kali berperan sebagai penengah atau mediator, memberikan nasihat moral dan spiritual kepada para demonstran. Dalam konteks era digital saat ini, peran ulama juga mulai beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Banyak ulama yang kini menggunakan platform seperti Instagram dan Twitter untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan sosial, serta untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu terkini (Zainuddin, 2021). Dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025, para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) juga secara aktif melakukan mediasi antara pemerintah dan rakyat sehingga demonstrasi yang terjadi bisa berlangsung dengan baik bagi kedua-belah pihak, di satu sisi tidak ditunggangi oleh berbagai kepentingan yang mengarah pada makar dan di sisi lain respon positif pemerintah terhadap tuntutan rakyat tersebut (NU Online, 2025).

## **1. KH. Hasyim Asy'ari: Suara Ulama di Era Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan**

### **A. Latar Belakang KH. Hasyim Asy'ari**

Kyai Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1926. Kontribusi KH. Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks ini, beliau dikenal sebagai sosok yang mengedepankan dialog antara agama dan negara, serta berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Masykuri, 2019).

Dalam perjalanan hidupnya, KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng yang menjadi pusat pendidikan Islam dan pengembangan pemikiran Islam moderat. Melalui pesantren ini, beliau melahirkan banyak ulama dan cendekiawan yang berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik dan sosial. Beliau juga aktif dalam organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Masyumi, yang menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan umat Islam di Indonesia (Husni, 2020).

Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Penjajahan ini tidak hanya mengikis kekayaan alam, tetapi juga merusak struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, KH. Hasyim Asy'ari muncul sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak umat Islam dan menentang kebijakan kolonial yang merugikan. Beliau menyadari bahwa untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan kesatuan di kalangan umat Islam (Zuhri, 2021).

Selama penjajahan Jepang, KH. Hasyim Asy'ari mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Jepang yang awalnya terlihat lebih lunak dibandingkan Belanda. Namun, beliau tetap menekankan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Dalam pandangannya, umat Islam harus bersatu dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik melalui pendidikan maupun politik (Kusnadi, 2022).

## **B. Pandangan KH. Hasyim Asy'ari tentang Aspirasi kepada Pemerintah**

KH. Hasyim Asy'ari mengambil pendekatan pragmatis terhadap penjajahan Jepang. Meskipun Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari umat Islam dengan mengklaim sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, beliau tetap waspada. Dalam berbagai pidatonya, KH. Hasyim menekankan bahwa umat Islam harus tetap kritis dan tidak terjebak dalam propaganda Jepang. Beliau percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang konsisten dan tidak bergantung pada kekuatan asing (Hidayat, 2020).

Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah ketika KH. Hasyim Asy'ari mengajak umat Islam untuk aktif dalam organisasi-organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan. Beliau mendorong para santri dan masyarakat untuk terlibat dalam pergerakan nasional, meskipun dalam situasi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang pemikir strategis yang memahami dinamika politik pada zamannya (Sukardi, 2023).

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, KH. Hasyim Asy'ari terus berkontribusi dalam membangun tatanan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beliau mendorong umat Islam untuk terlibat dalam pemerintahan dan menyampaikan aspirasi mereka secara konstruktif. Dalam pandangannya, hubungan antara Islam dan negara harus dibangun atas dasar saling menghormati dan bekerja sama untuk kepentingan bersama (Rahman, 2021).

Salah satu strategi yang diterapkan oleh KH. Hasyim adalah melalui dialog antar agama dan kelompok masyarakat. Beliau percaya bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk non-Muslim, sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, KH. Hasyim juga berperan dalam mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Manshur, 2022).

## **C. Dampak Pandangan KH. Hasyim Asy'ari terhadap Gerakan Islam**

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan organisasi Islam di Indonesia. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, beliau berhasil menggerakkan umat Islam untuk bersatu dan berjuang demi kepentingan bersama. NU menjadi wadah bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politik dan sosial mereka, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa (Alamsyah, 2020).

Dalam konteks ini, KH. Hasyim juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui NU, beliau menginisiasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kontribusi KH. Hasyim tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi (Fauzi, 2023).

Warisan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks hubungan antara Islam dan negara. Di era digital, tantangan baru muncul, seperti radikalisasi dan intoleransi. Dalam menghadapi isu-isu ini, pandangan KH. Hasyim tentang

pentingnya dialog dan kolaborasi antar umat beragama sangat diperlukan. Beliau mengajarkan bahwa keberagaman harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa (Sari, 2022).

Selain itu, pemikiran KH. Hasyim tentang pentingnya pendidikan juga sangat relevan di era ini. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan zaman. Melalui pendidikan, umat Islam dapat memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara benar, sehingga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara (Halim, 2023).

## **II. Gus Dur: Suara Perubahan di Era Orde Baru dan Reformasi**

### **A. Latar Belakang Gus Dur**

Biografi dan kontribusi Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah seorang ulama, aktivis, dan politisi yang menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Gus Dur merupakan tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kontribusinya dalam memperjuangkan pluralisme dan demokrasi sangat signifikan, terutama di era Orde Baru yang dikenal dengan pengkekangan kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, Gus Dur tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berani menantang otoritarianisme (Mujiburrahman, 2006).

Konteks sosial-politik pada zamannya Era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ditandai dengan stabilitas politik tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kebijakan pemerintah yang otoriter memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan aktivis. Dalam konteks ini, Gus Dur muncul sebagai suara yang membawa harapan bagi banyak orang. Ia mengadvokasi reformasi politik dan sosial, serta memperjuangkan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Pada tahun 1998, ketika gerakan reformasi mulai menguat, Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang diharapkan dapat memimpin perubahan (Salim, 2017).

### **B. Pandangan Gus Dur tentang Demonstrasi dan Aspirasi**

Gus Dur memiliki pandangan yang unik mengenai demonstrasi. Ia percaya bahwa demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang sah dalam sebuah negara demokratis. Lebih jauh lagi, dalam pandangannya demonstrasi bukan hanya hak tetapi juga kewajiban bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama ketika pemerintah melakukan tindakan yang dianggap tidak adil. Gus Dur sering menekankan pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa demonstrasi dapat menjadi jembatan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik antara kedua belah pihak (Hasan, 2018).

Selama gerakan reformasi, Gus Dur berperan aktif dalam mendukung aksi-aksi demonstrasi yang menuntut perubahan. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga terlibat langsung dalam diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu momen penting adalah ketika ia memberikan dukungan kepada mahasiswa yang

melakukan aksi di Jakarta pada tahun 1998. Gus Dur berupaya menengahi konflik antara demonstran dan aparat keamanan, mendorong pendekatan damai dalam menghadapi situasi yang tegang. Pendekatannya yang inklusif ini berhasil menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perubahan politik (Zuhri, 2020).

Warisan pemikiran Gus Dur sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam moderat di Indonesia. Ia mengedepankan konsep Islam yang ramah dan inklusif, yang menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama. Gus Dur sering kali menegaskan bahwa Islam tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemanusiaan. Pemikirannya ini telah menginspirasi banyak kalangan, terutama generasi muda, untuk mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan terbuka dalam beragama (Mujahid, 2019).

Relevansi dalam konteks politik kontemporer Pemikiran Gus Dur tetap relevan dalam konteks politik Indonesia saat ini, di mana isu-isu pluralisme dan toleransi masih menjadi tantangan besar. Dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi yang meningkat, ajaran Gus Dur tentang pentingnya dialog dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi semakin penting. Banyak organisasi dan gerakan sosial yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Gus Dur untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Dengan demikian, warisan Gus Dur tidak hanya terpatri dalam sejarah, tetapi juga terus hidup dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik (Sukardi, 2021).

### **III. Gus Baha: Suara Ulama di Era Digital**

#### **A. Latar Belakang Gus Baha**

Gus Baha, atau KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, merupakan salah satu ulama terkemuka di Indonesia yang lahir pada 19 September 1970 di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah seorang pengasuh pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Kajen, Pati, yang dikenal luas karena pemikiran dan ajarannya yang moderat serta berorientasi pada pembaruan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Gus Baha menyelesaikan pendidikan di pesantren dan melanjutkan studi di berbagai lembaga pendidikan tinggi, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Diponegoro. Kontribusinya dalam bidang pendidikan dan dakwah sangat signifikan, terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman agama yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman (NU Online, 2023).

Dalam konteks sosial dan politik, Gus Baha berperan aktif dalam menjembatani antara nilai-nilai Islam dan tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Ia sering memberikan ceramah dan kuliah umum yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik dan sosial, serta bagaimana Islam dapat menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, Gus Baha berhasil menarik perhatian generasi muda untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan mereka (Al-Qur'an dan Hadis, 2022).

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara informasi disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat. Dengan kemajuan teknologi informasi, akses terhadap berita dan informasi menjadi lebih mudah, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran berita hoaks dan polarisasi sosial. Dalam konteks ini, ulama seperti Gus Baha

memiliki peran penting untuk memberikan pencerahan dan membimbing masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022, sekitar 77% penduduk Indonesia menggunakan internet, dan sebagian besar di antaranya aktif di media sosial (APJII, 2022).

Gus Baha menyadari bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ia mendorong pengikutnya untuk memanfaatkan platform digital untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang konstruktif, serta untuk menghindari konten yang bersifat provokatif dan merusak. Dalam berbagai ceramahnya, Gus Baha menekankan pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang akhlak dan adab dalam berinteraksi (Mardani, 2023).

### **B. Pandangan Gus Baha tentang Aspirasi kepada Pemerintah**

Gus Baha memiliki pandangan yang progresif terhadap penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia percaya bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat suara masyarakat, terutama dalam menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, Gus Baha sering menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pandangannya tentang isu-isu aktual, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga politik. Hal ini sejalan dengan tren global di mana banyak pemimpin agama dan tokoh masyarakat menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Hidayat, 2023).

Dalam sebuah wawancara, Gus Baha menyatakan bahwa media sosial harus digunakan sebagai sarana untuk membangun dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons aspirasi rakyat. Dengan menggunakan media sosial, Gus Baha berharap dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan stigma atau represi (Sari, 2022).

Strategi Gus Baha dalam menyampaikan aspirasi di era digital melibatkan penggunaan konten yang edukatif dan inspiratif. Ia sering membagikan video ceramah dan tulisan yang memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat. Dengan cara ini, Gus Baha tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik dan sosial. Data menunjukkan bahwa konten yang bersifat edukatif lebih mudah diterima dan dibagikan di media sosial, sehingga dapat memperluas jangkauan pesan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023).

Selain itu, Gus Baha juga menggunakan pendekatan yang inklusif dengan melibatkan berbagai kalangan dalam diskusi. Ia sering mengadakan forum atau diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perspektif yang ada, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat. Dalam konteks ini, Gus Baha berusaha menciptakan ruang dialog yang aman dan konstruktif, di mana setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya tanpa merasa tertekan (Wahyu, 2023).

### **C. Implikasi Pemikiran Gus Baha**

Pemikiran Gus Baha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap generasi muda di Indonesia. Dengan pendekatannya yang moderat dan inklusif, ia berhasil menarik perhatian banyak anak muda untuk lebih aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian, sekitar 65% generasi muda merasa terinspirasi oleh ajaran Gus Baha untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial dan politik mereka (Lembaga Survei Indonesia, 2023).

Gus Baha juga mendorong generasi muda untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif dan membangun komunitas yang saling mendukung. Ia percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, dan dengan pemahaman yang baik tentang agama dan etika, mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik (Zainal, 2023).

Dalam konteks masyarakat digital, pemikiran Gus Baha tetap relevan dan dapat dijadikan acuan bagi banyak orang. Ia mengajarkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan mengedepankan akhlak dan etika dalam berinteraksi di dunia maya, Gus Baha memberikan panduan bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Dalam era di mana berita hoaks dan informasi yang menyesatkan mudah tersebar, ajaran Gus Baha tentang kebenaran dan kejujuran menjadi semakin penting (Fauzi, 2023).

Melalui pendekatan yang moderat dan kontekstual, Gus Baha menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa agama bukanlah penghalang untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam kemajuan teknologi, melainkan sebagai landasan moral yang dapat membimbing tindakan kita dalam dunia digital (Sukma, 2023).

## **IV. Perbandingan Pandangan Ulama**

### **A. Kesamaan dan Perbedaan Pendekatan**

Dalam menganalisis pandangan ulama Nusantara terhadap hubungan antara Islam dan negara, terdapat beberapa tema utama yang sering muncul. Pertama, tema tentang kedaulatan rakyat dan peran negara dalam menegakkan keadilan sosial. Misalnya, ulama seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam bernegara, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung keberagaman di Indonesia (Hasyim, 2020). Sebaliknya, ulama konservatif seperti Rizieq Shihab lebih menekankan pada penerapan syariat Islam secara ketat, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua, tema mengenai peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi sorotan. Banyak ulama sepakat bahwa Islam harus menjadi landasan moral dalam pembuatan kebijakan publik, namun cara penerapannya berbeda. Ulama moderat cenderung mendorong interpretasi yang inklusif, sedangkan ulama yang lebih tradisional sering kali menekankan interpretasi yang lebih eksklusif (Nugroho, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan akan pentingnya agama, perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Perbedaan pandangan di antara ulama juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman sosial, dan konteks historis. Misalnya, ulama yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren cenderung lebih konservatif dalam pandangannya, sedangkan mereka yang terpapar pada pendidikan formal dan pemikiran modern seringkali lebih progresif (Zainal, 2022). Selain itu, pengalaman sosial, seperti keterlibatan dalam gerakan politik atau sosial, juga dapat membentuk pandangan mereka terhadap hubungan Islam dan negara.

Konteks historis juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan ulama. Misalnya, pengalaman masa Orde Baru yang otoriter telah memunculkan berbagai respon dari kalangan ulama, mulai dari yang mendukung reformasi hingga yang tetap setia pada rezim yang ada. Hal ini menciptakan spektrum pandangan yang beragam di kalangan ulama, yang terus berlanjut hingga saat ini (Murtadho, 2023). Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa perbedaan pandangan ini tidak muncul dalam kekosongan, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor.

## **B. Implikasi Terhadap Hubungan Islam dan Negara**

Pandangan ulama Nusantara memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks politik saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme. Dalam era digital, di mana informasi dan ide-ide dapat menyebar dengan cepat, suara ulama menjadi penting sebagai penyeimbang dalam diskursus publik. Misalnya, ulama seperti KH. Ma'ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, telah berperan aktif dalam meredam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan intoleransi dan ekstremisme (Setiawan, 2021). Pendekatan moderat yang diusungnya berpotensi menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif antara Islam dan negara.

Di sisi lain, ketegangan antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan ekstrem dan moderat juga menciptakan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, pandangan ulama yang mendukung pluralisme dan toleransi menjadi sangat relevan, terutama dalam upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa pemahaman agama yang moderat dapat mengurangi potensi radikalisme di kalangan generasi muda (BNPT, 2022). Oleh karena itu, peran ulama dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sangat penting dalam konteks politik saat ini.

Di tengah perbedaan pandangan yang ada, terdapat potensi besar untuk dialog antara Islam dan negara. Ulama dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Misalnya, inisiatif dialog antara ulama dan pemerintah yang diadakan oleh Kementerian Agama dapat menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (Kemenag, 2023). Dalam dialog semacam ini, ulama dapat

menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah dapat menjelaskan kebijakan yang diambil.

Lebih jauh, dialog ini juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Ketika ulama mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sebaliknya, jika ulama mengkritik kebijakan yang dianggap tidak adil, hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih mendengarkan suara masyarakat (Suharto, 2023). Dengan demikian, dialog antara Islam dan negara tidak hanya penting untuk menciptakan kebijakan yang tepat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam konteks hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, pandangan ulama Nusantara sangat beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan budaya masing-masing. Misalnya, ulama seperti K.H. Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa Islam harus menjadi landasan moral bagi negara, sementara ulama modernis seperti Nurcholish Madjid menekankan pentingnya pemisahan antara agama dan politik. Hal ini menunjukkan adanya spektrum pemikiran yang luas di kalangan ulama, yang mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani dan R. William Liddle (2010), perbedaan pandangan ini sering kali menciptakan ketegangan dalam masyarakat, terutama ketika demonstrasi digunakan sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi politik.

Demonstrasi telah menjadi salah satu cara yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dalam konteks ini, ulama sering kali berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya, dalam kasus demonstrasi 212 pada tahun 2016, banyak ulama yang terlibat dalam aksi tersebut untuk menuntut keadilan dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), demonstrasi tersebut dihadiri oleh lebih dari satu juta orang, menunjukkan bahwa demonstrasi dapat menjadi sarana mobilisasi massa yang kuat dalam menyampaikan pesan politik (Komnas HAM, 2016).

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Islam dan negara, penting bagi ulama dan pemerintah untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Dialog ini tidak hanya akan membantu meredakan ketegangan yang ada, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, program-program yang melibatkan ulama dalam pengambilan keputusan, seperti dalam penanganan isu sosial dan pendidikan, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Amin, 2021).

Era digital membawa tantangan baru dalam hubungan antara Islam dan negara. Oleh karena itu, perluasan penelitian yang fokus pada interaksi ini sangat penting. Penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial mempengaruhi mobilisasi massa dan pandangan ulama terhadap isu-isu kontemporer dapat memberikan wawasan yang berharga.

Sebagai contoh, penelitian oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting bagi ulama untuk menyampaikan pesan-pesan mereka dan berinteraksi dengan generasi muda, yang seringkali lebih aktif di platform digital. Dalam konteks ini pilihan para ulama berkompeten seperti Gus Baha untuk menggunakan media sosial sebagai sarana dakwahnya menjadi hal yang sangat penting.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A. (1999). *Ulama dan Gerakan Reformasi: Peran dan Pengaruhnya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Alamsyah, A. (2020). Kontribusi KH. Hasyim Asy'ari dalam Pergerakan Islam di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat*, 15(2), 45-60.
- Al-Qur'an dan Hadis. (2022). Pemikiran Gus Baha tentang Pendidikan dan Sosial. Diakses dari <https://www.alqurandanhadis.com/>
- Amin, A. (2021). "Ulama dan Pemerintah: Membangun Dialog untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 123-134.
- APJII. (2022). Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia. Diakses dari <https://apjii.or.id/>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Demonstrasi dalam Pandangan Ulama Nusantara: Rekonstruksi Hubungan Islam dan Negara dari Era Pasca Kemerdekaan Hingga Era Digital*
- Esposito, J. L. (2011). *Islam: The Straight Path*. New York: Oxford University Press.
- Fauzi, R. (2023). Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembangunan Sosial di Indonesia. *Media Islamika*. Diakses dari <https://mediaislamika.com>
- Halim, S. (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 23-35.
- Hamka. (1980). *Tasawuf Modern*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Liddle, R. W. (1996). *Indonesia: The Uncertain Transition*. In *The Politics of Indonesia* (pp. 1-25).
- Hasan, A. (2018). *Gus Dur dan Demokrasi: Suara Perubahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Hasyim, A. (2019). *Islam dan Kebangkitan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hidayat, R. (2023). *Digitalisasi dan Transformasi Sosial dalam Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, A. (2020). KH. Hasyim Asy'ari dan Pendekatan Politik Islam. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 12(3), 78-92.
- Hidayat, R. (2023). Penggunaan Media Sosial oleh Ulama di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 45-60.
- Husni, M. (2020). *Biografi KH. Hasyim Asy'ari: Pemikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Program Dialog Ulama dan Pemerintah*.
- Murtadho, A. (2023). *Politik Ulama di Indonesia: Dari Orde Baru hingga Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Statistik Penggunaan Media Sosial di Indonesia. Diakses dari <https://kominfo.go.id/>
- Komnas HAM. (2016). "Laporan Tahunan 2016." Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kompas. (2025). "Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan bukan Demo." Diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/01/20460741/zulhas-tokoh-agama-temui-prabowo-sepakat-penjarahan-dan-perusakan-bukan-demo>)
- Kusnadi, B. (2022). Sikap KH. Hasyim Asy'ari terhadap Penjajahan Jepang. *Jurnal Sejarah*, 9(4), 112-125.
- Laporan Tahunan BNPT 2021. Hasyim, M. (2020). *Islam dan Pluralisme: Perspektif Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Survei Pengaruh Pemikiran Gus Baha terhadap Generasi Muda. Diakses dari <https://www.lsi.or.id/>
- Manshur, I. (2022). Dialog Antar Agama dalam Konteks Sosial Politik Indonesia. *Jurnal Multikulturalisme*, 10(1), 15-29.
- Mardani, A. (2023). Etika Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Etika dan Media*, 5(1), 23-34.
- Masykuri, A. (2019). KH. Hasyim Asy'ari dan Perjuangannya untuk Kemerdekaan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 30-44.
- Mujahid, A. (2019). *Islam Moderat: Pemikiran Gus Dur dalam Konteks Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). "Islam, Democracy, and the State in Indonesia." *Asian Survey*, 50(3), 569-591.
- Mujiburrahman, M. (2006). *Islam dan Demokrasi: Refleksi Pemikiran Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mujiburrahman. (2006). *Islam in Indonesia: The Challenge of Modernity*. Jakarta: Paramadina.
- Naim, M. (2022). *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- New York: Columbia University Press. Mietzner, M. (2009). *The 1998 Indonesian Reforms: A Political Perspective*. In *Reformasi: The End of Soeharto*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2004). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- NU Online. (2023). Gus Baha: Ulama Moderat yang Menginspirasi. Diakses dari <https://www.nu.or.id/>
- NU Online. (2025). Gerakan Nurani Bangsa desak Prabowo segera Evaluasi dan Reformasi Polri." Diakses dari (<https://nu.or.id/nasional/gerakan-nurani-bangsa-desak-prabowo-segera-evaluasi-dan-reformasi-polri-Zmf0E>)
- NU. (2023). Nahdlatul Ulama. Retrieved from <https://www.nu.or.id/>
- Nugroho, R. (2021). *Islam dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Rahman, A. (2022). *Ulama dan Politik: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Rahman, F. (2022). "Media Sosial dan Mobilisasi Massa: Peran Ulama di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 45-60.
- Rahman, T. (2021). Aspirasi Umat Islam Pasca Kemerdekaan: Pandangan KH. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Politik dan Agama*, 5(3), 50-65.
- Sari, D. (2022). Dialog antara Pemerintah dan Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 8(3), 67-78.
- Salim, A. (2017). *Gus Dur: Biografi dan Warisan Pemikiran*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, A. (2021). Peran KH. Ma'ruf Amin dalam Politik Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(1), 45-60.
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam dan Negara: Sebuah Kajian Historis*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukardi, T. (2023). *Pluralisme dan Toleransi dalam Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Cinta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, F. (2023). Dialog dan Legitimasi: Peran Ulama dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(2), 78-92.
- Sukardi, D. (2021). *Warisan Gus Dur dan Tantangan Pluralisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Sukardi, E. (2023). KH. Hasyim Asy'ari: Sejarah dan Warisannya. *Jurnal Sejarah Nasional*, 6(1), 60-75.
- Zuhri, M. (2021). Konteks Sosial Politik Indonesia pada Awal Abad ke-20. *Jurnal Sejarah dan Politik*, 4(2), 22-38.
- Sukma, R. (2023). Relevansi Pemikiran Gus Baha dalam Masyarakat Digital. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(1), 15-29.
- Tempo. (2025). "Alasan Mahfud Menilai Demonstrasi Massa bukan Rakayasa." Diakses dari (<https://www.tempo.co/politik/alasan-mahfud-menilai-demonstrasi-massa-bukan-rekayasa-2066632>)
- UMJ. (2025). "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi dan Empat jadi Sorotan Nasional." Diakses dari ([https://umj.ac.id/just\\_info/178-tuntutan-rakyat-transparansi-reformasi-dan-empat-jadi-sorotan-nasional/](https://umj.ac.id/just_info/178-tuntutan-rakyat-transparansi-reformasi-dan-empat-jadi-sorotan-nasional/))
- Wahyu, S. (2023). Forum Diskusi Ulama dan Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 6(2), 34-50.
- Zainal, M. (2022). *Pendidikan Pesantren dan Perubahan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainal, M. (2023). Generasi Muda sebagai Agen Perubahan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 11(4), 90-102.
- Zainuddin, M. (2021). Ulama dan Media Sosial: Peran Ulama dalam Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 123-135. Retrieved from <https://uinjkt.ac.id>
- Zuhri, M. (2020). *Gerakan Reformasi dan Peran Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Zuhri, M. (2021). *Ulama dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.